

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Implementasi Pemerintahan Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bambang Ari Satria^a

^aKanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
e-mail : bambangatria09@gmail.com

Abstrak

Perkembangan digitalisasi yang semakin kompleks membuat pemerintah terus mengembangkan pemerintahan digital sebagai bentuk percepatan reformasi birokrasi. Ini juga berlaku dalam sistem pengelolaan arsip. Transformasi digital di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kearsipan melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Tujuan penelitian ini mendeskripsikan implementasi aplikasi SRIKANDI di Kanwil Kemenag Kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian yaitu deskriptif pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI di Kanwil Kemenag Kepulauan Bangka Belitung sudah dilaksanakan baik. Dari aspek komunikasi sangat baik, karena pimpinan mendukung penerapan aplikasi SRIKANDI melalui sosialisasi. Aspek sumber daya sudah baik karena memiliki pegawai mumpuni untuk mengelola aplikasi SRIKANDI. Aspek disposisi sudah baik karena setiap pegawai di unit pengolah aktif menggunakan SRIKANDI. Dan aspek struktur birokrasi sangat baik, penggunaan aplikasi SRIKANDI sesuai dengan ruang lingkup yang ada pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis dan Terintegrasi.

Kata Kunci: Aplikasi SRIKANDI; Implementasi; Pemerintahan Digital

Implementation of Digital Governance Through the SRIKANDI Application At the Bangka Belitung Islands Ministry of Religion Regional Office

Abstract

The increasingly complex development of digitalization has made the government continue to develop digital government as a form of accelerating bureaucratic reform. This also applies to records management systems. Digital transformation at the Regional Office of the Ministry of Religion of Bangka Belitung Islands Province in archives through the SRIKANDI Application (Integrated Dynamic Archival Information System). The aim of this research is to describe the implementation of the SRIKANDI application at the Bangka Belitung Islands Regional Office of the Ministry of Religion. The type of research is a descriptive qualitative approach, with observation, interview and documentation data collection. The research results show that the implementation of the SRIKANDI application at the Regional Office of the Ministry of Religion for the Bangka Belitung Islands has been carried out well. From the communication aspect, it is very good, because the leadership supports the implementation of the SRIKANDI application through socialization. The resource aspect is good because it has qualified employees to manage the SRIKANDI application. The disposition aspect is good because every employee in the processing unit actively uses SRIKANDI. And the bureaucratic structure aspect is very good, the use of the SRIKANDI application is in accordance with the scope contained

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

in the Circular Letter of the Secretary General of the Ministry of Religion Number 31 of 2022 concerning the Use of Dynamic and Integrated Archive System Applications.

Keywords: *Digital Governance; Implementation; SRIKANDI Application*

A. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan prioritas dan menjadi perhatian Kementerian Agama dibawah kepemimpinan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas adalah transformasi digital. Pemerintahan digital kini menjelma menjadi bagian penting dalam administrasi negara, membawa perubahan fundamental dalam efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan publik. Pemerintahan digital melalui sistem informasi yang terintegrasi dapat mengelola data dengan lebih efektif, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyediakan layanan yang lebih cepat dan terukur kepada masyarakat. Dalam aspek efisiensi, teknologi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, mengurangi jalur birokrasi yang relatif panjang, dan mempercepat proses administratif. Responsivitas pemerintah juga meningkat karena teknologi memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat antara institusi publik dan pengguna layanan dalam hal ini masyarakat.

Adopsi teknologi juga mengangkat standar layanan publik dengan memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah (Mugiarto et al. 2023; As-Sajjad et al., 2023). Penggunaan sistem dalam organisasi telah umum diketahui dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target kerja serta pelayanan bagi pengguna (Maulana dan Priatna, 2021; Sinrang, 2023; As-Sajjad et al., 2023; Mugiarto et al., 2023) untuk mencapai kualitas yang lebih baik dalam skala lebih besar (Harahap dan Zulvia, 2023; Sofiani dan Supriatna, 2023; Andikaputra et al., 2022; Sofiani dan Riani, 2021). Umumnya sistem aplikasi yang seringkali dikaitkan bagaimana tingkat penerimaan dari penggunaanya (Syawali et al., 2023; Kawidjaya et al., 2023).

Sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan dalam rangka memberi perhatian terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Agama sudah menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Implementasi ini menandai bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik diterapkan secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi dirasakan penting dan sebaik mungkin dalam rangka tujuan utama mewujudkan transformasi digital yang ada di Kementerian Agama dalam bentuk meningkatkan layanan dan membuatnya menjadi lebih mudah dan lebih ringkas. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) diluncurkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi internal antar instansi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama, aplikasi SRIKANDI diluncurkan untuk pertama kalinya di Kanwil Kemenag Kepulauan Babel pada tanggal 4 Oktober 2023. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis menciptakan SRIKANDI juga bagian

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

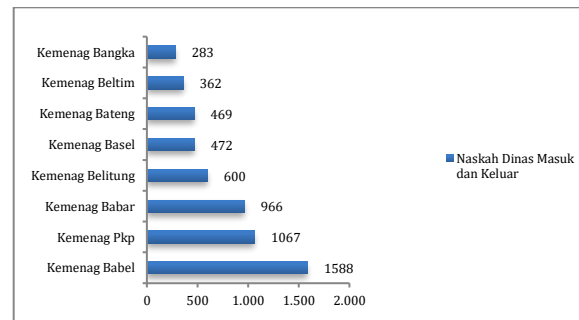
dari instrumen kebijakan untuk mengelola arsip dinamis.

Pada implementasi aplikasi SRIKANDI, kolaborasi terjalin antar lembaga. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertanggung jawab untuk menyusun proses bisnis dan data/informasi pengelolaan arsip dinamis, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menyusun regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi dan menyediakan infrastruktur TIK, dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSNN) bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur TIK.

Aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman pegawai tentang kapasitas dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kearsipan digital dapat disimpan dengan baik, yang pada akhirnya akan menjadi memori dan akuntabilitas kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan tata kelola pemerintahan yang baik, penulis ingin melakukan penelitian tentang implementasi pemerintahan digital melalui aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Saat ini, transformasi digital sangat menarik bagi masyarakat. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses analog ke digital merupakan kebutuhan. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas. Kekuatan digital adalah inti dari sistem pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Oleh karena itu fungsi administratif, pelayanan sosial, pemantauan dan pengelolaan sumber daya administratif diawasi oleh sistem ini. Pengembangan baru yang disebut pemerintahan digital bertujuan untuk

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi layanan publik. Seperti yang dinyatakan oleh World Bank Group (Suaedi, Wardianto 2010: 54), Pemerintahan digital merupakan ikhtiar untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab aktor pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik kepada pengguna layanan. Percepatan digitalisasi layanan publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik.



Gambar 1. Capaian Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Di Kanwil Kemenag Kepulauan Babel Bulan Januari – Juni 2024

Berdasarkan gambar 1. diatas, capaian penggunaan SRIKANDI di Kanwil Kemenag Kepulauan Babel dari bulan Januari hingga Juni 2024 sebanyak 1.588 naskah. Penggunaan tersebut termasuk naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. Penggunaan SRIKANDI juga dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian Kemenag Kota Pangkalpinang sebanyak 1.067 naskah, Kemenag Bangka Barat 966 naskah, Kemenag Belitung 600 naskah, Kemenag Bangka Selatan 472 naskah, Kemenag Bangka Tengah 469 naskah, Kemenag Belitung Timur 362 naskah dan Kemenag Bangka 283 naskah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian berjudul Implementasi Pemerintahan Digital melalui Aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

B. PEMBAHASAN

Transformasi digital adalah proses mengubah aktivitas, proses, dan model pelayanan secara keseluruhan menggunakan kemajuan teknologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang pelayanan baru. Melalui kajian ini, penulis membahas mengenai Implementasi Pemerintahan Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis menggunakan pendekatan Teori Implementasi Edward III dalam Mulyadi (2016:69) yang mengemukakan ada empat aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar Implementor kebijakan harus tahu apa yang mesti dilaksanakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana prasarana.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan.
- d. Struktur Birokrasi, menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini mencakup mekanisme program yang sudah ditetapkan melalui standar yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan.

Aspek Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi organisasi sangat kompleks dan rumit. Selain itu, interpretasi yang berbeda akan dihasilkan dari berbagai sumber data. Orang yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan harus tahu apakah mereka dapat melakukannya agar implementasi berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan kebijakan, semua pelaksana harus memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implementor kebijakan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Proses pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi kepada para implementor.

Dari aspek komunikasi, dengan indikator penyampaian informasi terkait aplikasi SRIKANDI capaiannya adalah terlaksananya launching implementasi aplikasi SRIKANDI dan sosialisasi penggunaan SRIKANDI V3. Ini merupakan bentuk komunikasi kebijakan dalam rangka mengenalkan aplikasi kepada para pegawai yang ada di Kanwil Kemenag Kepulauan Bangka Belitung. Launching implementasi aplikasi SRIKANDI dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 dan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI V3 dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024. Terlaksananya kegiatan tersebut karena ada dukungan dari pimpinan baik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Kepala Bagian Tata Usaha. Setelah sosialisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan selanjutnya yang berkaitan dengan

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

implementasi aplikasi SRIKANDI yakni turun langsung ke Kemenag Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penggunaan SRIKANDI V3. Beberapa kantor kementerian agama kabupaten/kota yang dilakukan pendampingan oleh tim Arsiparis Kanwil Kemenag Kepulauan Babel adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan.

Aspek Sumber Daya

Implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kemampuan lembaga/badan pelaksana memberdayakan sumber daya yang dimiliki karena sumber daya juga tidak hanya dilihat dari segi kuantitas tapi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan maka organisasi harus mengelola dengan baik sumber daya yang dimiliki. Menurut Meter dan Horn dalam Suratman (2017) Implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kemampuan lembaga/badan pelaksana memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan karena elemen tersebut saling melengkapi serta mempengaruhi keberhasilan proses implementasi.

Dari sisi aspek sumber daya, dalam hal ini penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai implementasi pemerintahan digital melalui Aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana. Dari indikator sumber daya manusia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 arsiparis. Keenam arsiparis ini tersebar di Bagian Tata Usaha, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) arsiparis tersebut di Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat membantu dalam menjalankan aplikasi SRIKANDI. Tak hanya itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membentuk PIC (Person in Charge) Unit Pengolah Kearsipan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 245 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021. Beberapa tugas PIC Kearsipan di unit pengolah adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan berkoordinasi dengan Arsiparis di unit kearsipan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola arsip yang baik dan andal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inovasi lainnya yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni dengan memberi surat tugas ke beberapa arsiparis untuk menindaklanjuti nota dinas pengajuan surat tugas pada bagian/bidang/bimas melalui Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 13/Kw.29.Tu/01/2024 tanggal 09 Januari 2024. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif sehingga pembuatan surat tugas tidak menumpuk di kepegawaian.

Pengguna SRIKANDI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini sudah ada 1.393 pengguna aktif dan 183 unit kerja aktif. Ini menandai bahwa secara keseluruhan akun pengguna untuk pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga ke kantor kementerian agama kabupaten/kota sudah dibuatkan akunnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa pegawai yang belum melaksanakan karena transisi budaya kerja untuk beralih sepenuhnya ke pengelolaan arsip secara digital masih menjadi kendala.

Dari indikator anggaran, tersedianya anggaran untuk pelaksanaan launching dan sosialisasi penggunaan SRIKANDI V3, tersedianya

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

anggaran untuk arsiparis mengikuti bimbingan teknis tata cara penggunaan SRIKANDI V3 dan tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan ketatausahaan terkait percepatan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Sementara, ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan aplikasi SRIKANDI yakni tersedianya laptop bagi arsiparis dan pegawai untuk penggunaan SRIKANDI dan tersedianya scanner di bagian PTSP untuk penerimaan surat secara manual dan kemudian diregistrasikan ke naskah masuk SRIKANDI.

Aspek Disposisi

Proses perumusan kebijakan bukan merupakan formulasi yang disepakati oleh masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi akan tetapi kebijakan saat ini seringkali bersifat top-down, yang dapat menyebabkan penolakan. Tanggapan pelaksana mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan. Menurut George C. Edward dalam Widodo (2011) disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang meliputi komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap para agen pelaksana kebijakan karena cara agen pelaksana menyikapi kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut. Karakteristik perilaku dan karakteristik pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran. Salah satu kualitas terpenting yang harus dimiliki pengambil keputusan adalah kejujuran dan integritas.

Temuan dari aspek disposisi yang berkaitan dengan indikator sikap pelaksana terhadap aplikasi SRIKANDI yakni sudah ada komitmen yang dimiliki oleh para unit pengolah mengimplementasikan SRIKANDI. Hal ini ditandai dengan aktifnya pegawai untuk

menciptakan arsip melalui aplikasi SRIKANDI. Tak hanya itu, umpan balik yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memberikan stimulus apresiasi penghargaan kepada unit kerja yang aktif menggunakan aplikasi seperti yang diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat melalui surat undangan Nomor: B-82/Kw.29/KS.02/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal undangan penganugerahan SRIKANDI Award Tahun 2023. Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara proaktif melakukan rekapitulasi penggunaan SRIKANDI setiap bulan terhadap unit kerja pengguna. Hal ini dilakukan agar para unit kerja semangat untuk menggunakan aplikasi tersebut dan kemudian diberikan apresiasi penghargaan.

Aspek Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Tachjan (2006), walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kemungkinan suatu kebijakan tidak dapat berjalan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek dalam implementasi adalah mekanisme biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak untuk menjaga pelaksanaan kebijakan tetap pada tujuan dan sasaran kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila adanya Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Temuan yang berkaitan dengan aspek struktur birokrasi yakni penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ruang lingkup penggunaannya menyesuaikan dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

penggunaan aplikasi SRIKANDI. Naskah dinas yang diregistrasi dalam aplikasi SRIKANDI yakni naskah dinas arahan berupa surat tugas, naskah dinas korespondensi eksternal berupa surat dinas, naskah dinas khusus berupa surat pengantar dan surat keterangan serta surat undangan.

Dari sisi instrumen kearsipan yang berkaitan dengan SOP, kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola kearsipan mengacu kepada empat instrumen kearsipan yakni Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Pada organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Tata Naskah Dinas berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, klasifikasi

arsip berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Arsip di Lingkungan Kementerian Agama, jadwal retensi arsip berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 120 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif. Begitu juga dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, instrumen kearsipan mengacu kepada kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai panduan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kearsipan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Secara umum diketahui bahwa implementasi Pemerintahan Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dengan baik. Dari aspek komunikasi, sudah sangat baik karena dilakukan sosialisasi secara massif kepada seluruh pegawai hingga ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dari aspek sumber daya relatif baik karena masih terdapat pegawai yang menggunakan naskah dinas manual dan perlu waktu untuk adopsi teknologi melalui aplikasi SRIKANDI. Dari aspek disposisi pegawai sudah baik karena di unit pengolah relatif aktif menggunakan

aplikasi dan dibantu PIC yang dibentuk di masing-masing unit pengolah. Dari aspek struktur birokrasi sudah sangat baik karena penggunaan aplikasi SRIKANDI sesuai dengan ruang lingkup yang ada pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis dan Terintegrasi serta adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Implementasi Pemerintahan Digital melalui Aplikasi SRIKANDI adalah dari aspek sumber daya melakukan penguatan kemampuan teknis bagi para pegawai serta aspek disposisi melakukan monitoring dan evaluasi berkala mengenai Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

REFERENSI

- As-Sajjad, M. D., Agustina, I., & Wiradiputra, I. A. (2023). Assessing Technical, Functional And Image Aspects Of Service Quality And Their Impact On Citizen Satisfaction. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 7(2), 173-188. <https://doi.org/10.30741/adv.v7i2.1215>
- Andikaputra, F., Yulandary, W., Zulvia, P., & Nugroho, A.B. (2022). Meninjau Efektivitas Sistem Rely-on Dalam Menunjang Pengelolaan Pelanggan Pada PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Batam. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 3(2), 143-162. <https://doi.org/10.32815/jpro.v3i2.1445>
- Harahap, A.S., Zulvia, P. (2023). Analisis Pengembangan Smart City berdasarkan Dimensi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Insitutional di Kota Padang Panjang. *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 618 - 624.

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1200>
- Kawidjaya, S. P., Nugroho, A. B., Pradesa, H. A., & Taufik, N. I. (2023). Persepsi Atas Kualitas Sistem Dan Informasi Dalam Mendorong Kepuasan Pengguna Sistem BJB Greens. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 7775-7788. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.2548>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Arsip Di Lingkungan Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Agama Nomor 120 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif
- Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Pada Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
- Maulana, R.R., Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 419 - 423. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>
- Mugiarto, M., Agustina, I., & Suryaman, W. (2023). Adopsi Teknologi Aplikasi Aset Dan Kompetensi Pegawai Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Pengelolaan Barang Milik Negara Di Sopa Kota Cimahi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4823-4835. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2800>
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muna, F. , Sutrisno, E. , & Giyanto, B. (2024). Case Study of the Institutional Management Policy National Laboratory Post Transition the National Institute of Health Research and Development (NIHRD). *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 5(1), 569-578. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.5054>
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Sinrang, A. (2023). Government Management Analysis with a System Approach at the Office of Settlements and Infrastructure. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(3), 185-190. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i3.58>
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Village Administrators' Quality of Work: Evaluation and Improvement. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 7, No.1, pp. 1 - 10.
- Sofiani, N., & Riani, A. (2021). Rancangan Sistem Pengendalian Manajemen Menggunakan Metode Six Sigma di Digital Innovation Lounge (dilo) Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 2(2), 16-25. <https://doi.org/10.32815/jpro.v2i2.836>
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Suryanto, A., Nurdin, N., Sutrisno, E., & Reza, I. F. (2022). Information Technology Preparedness in Indonesia's Future Capital Area. *KnE Social Sciences*, 7(9), 1286–1296.
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11016>
- Sutrisno, E. (2020). Civil servants management reform in west java province: A case study. *Jurnal Good Governance*, 16 (1), 1 – 7.
- Syawali, A.Z.S., Harahap, A.S., Pradesa, H.A., Andikaputra, F.A.T. (2023). Analisis Penggunaan Aplikasi BJB DIGI Mobile Banking dengan Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 624 – 633.
<https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1205>
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: API Bandung
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia.